



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



LAPORAN BULANAN BULAN MARET 2025

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Contact Us
(021) 22859672

More Information
www.ptun-jakarta.go.id

Our Office
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	15
BAB III. TELAAHAN	23
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	24

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

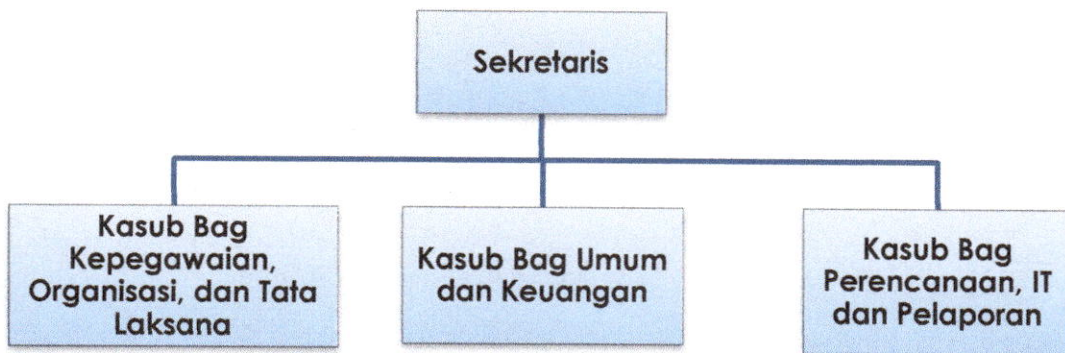
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



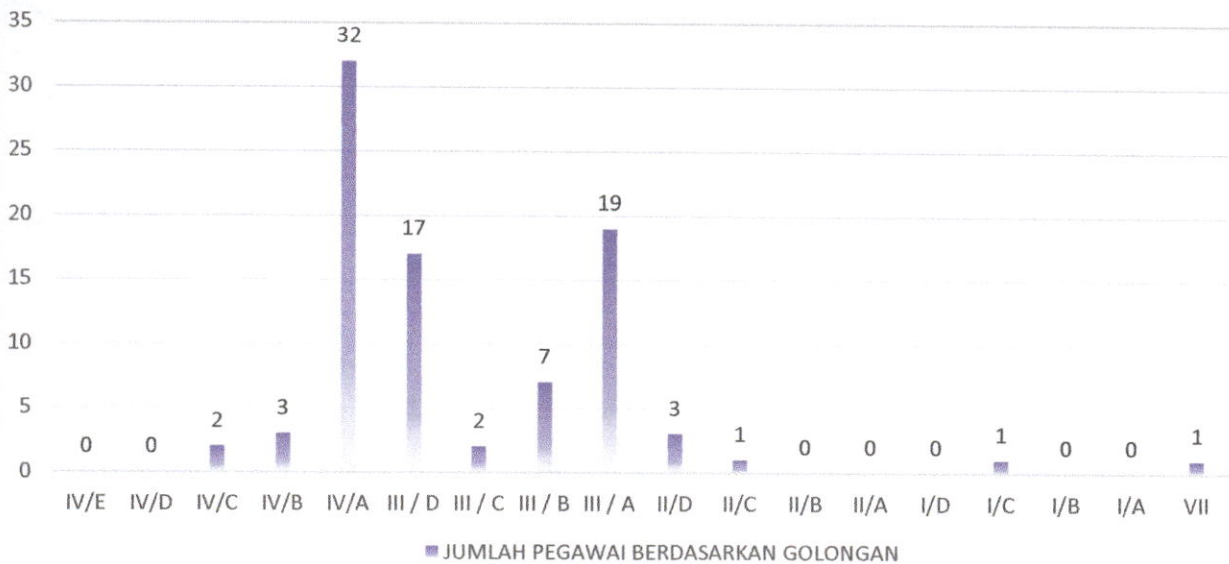
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Maret 2025 adalah 85 Orang, CPNS 2 Orang, 1 Orang PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 62 orang dan Perempuan 23 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

Mutasi Keluar Wilayah

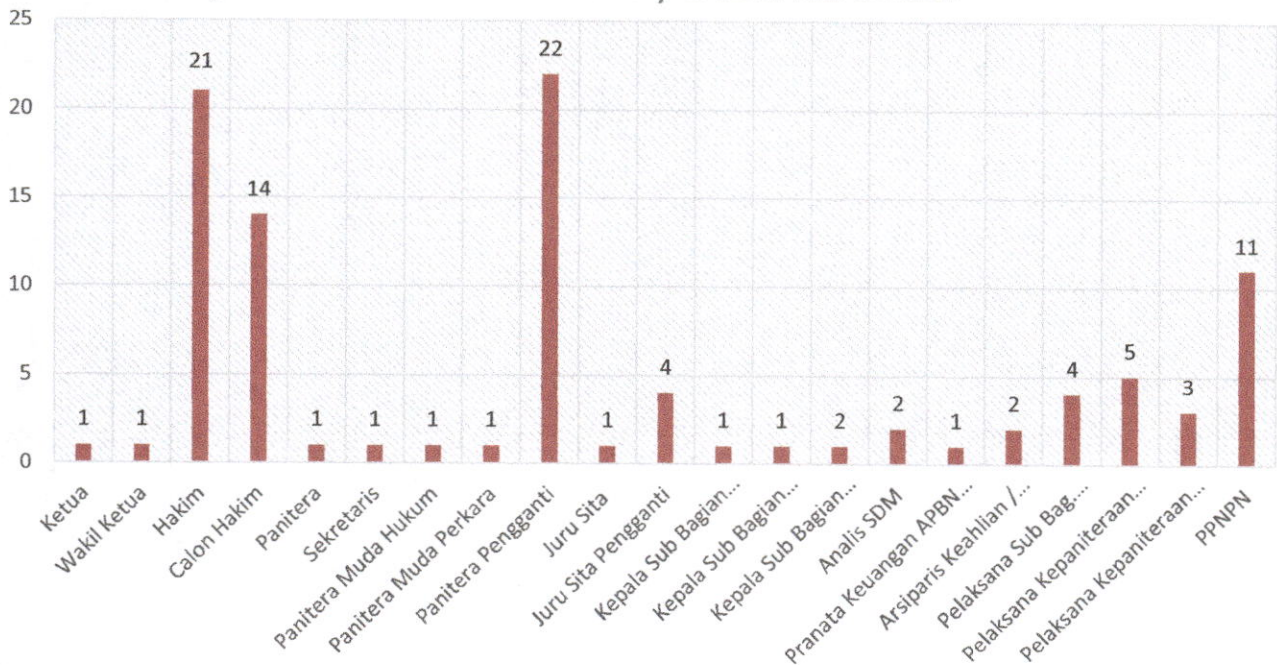
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Faisal Zad, S.H., M.H.	Hakim pada PTUN Jakarta	Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	TMT 03 Maret 2025

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	18	0	0	18
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	24	0	0	24
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	1	0	0	1
4	Kepaniteraan Muda Perkara	154	0	0	154
5	Kepaniteraan Muda hukum	27	0	0	27
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					224

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK			JUMLAH	
		DARI	BIASA	PENTING		RAHASIA
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	1	50	0	51
2		PT.TUN-JAKARTA	3	0	0	3
3		BALITBANG DIKLAT KUMDI	2	0	0	2
4		DIRJEND.BADIMILTUN	13	0	0	13
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	65	0	0	65
7		UMUM/LAIN-LAIN	6	0	0	6
TOTAL					140	

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

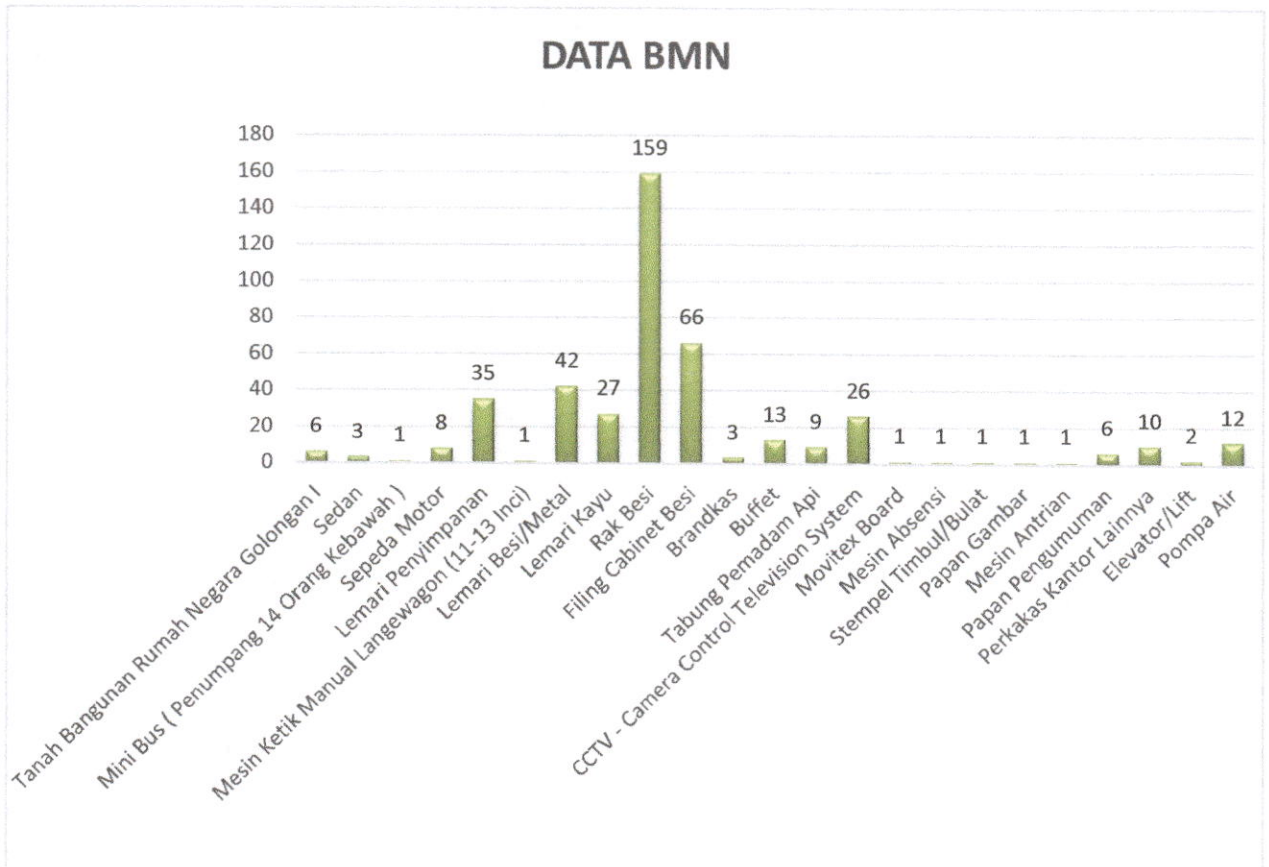
2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

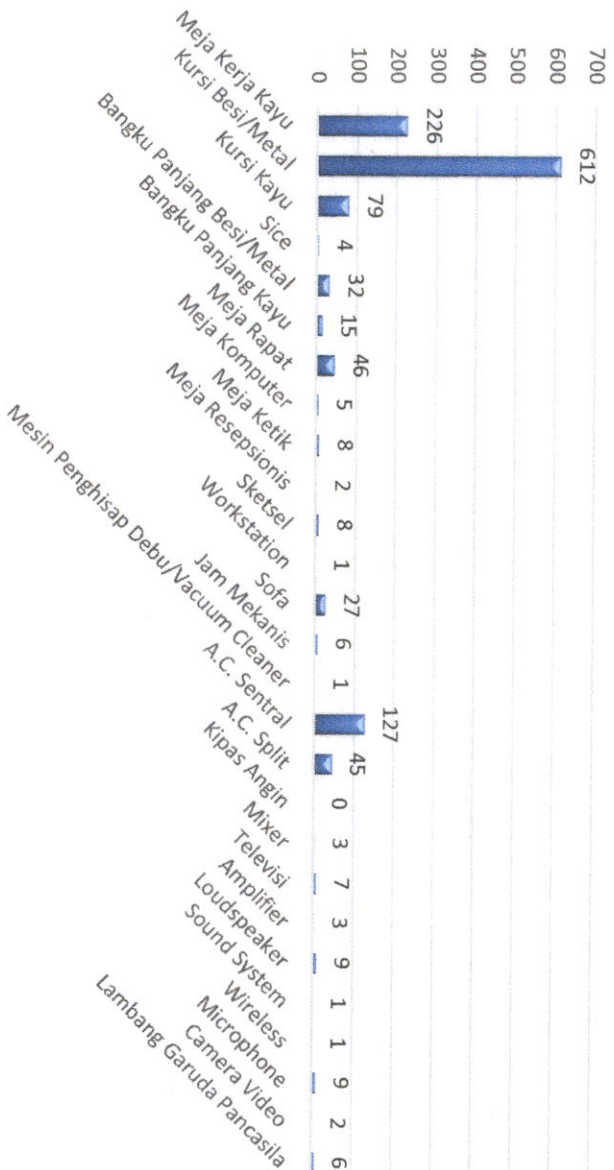
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Maret Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

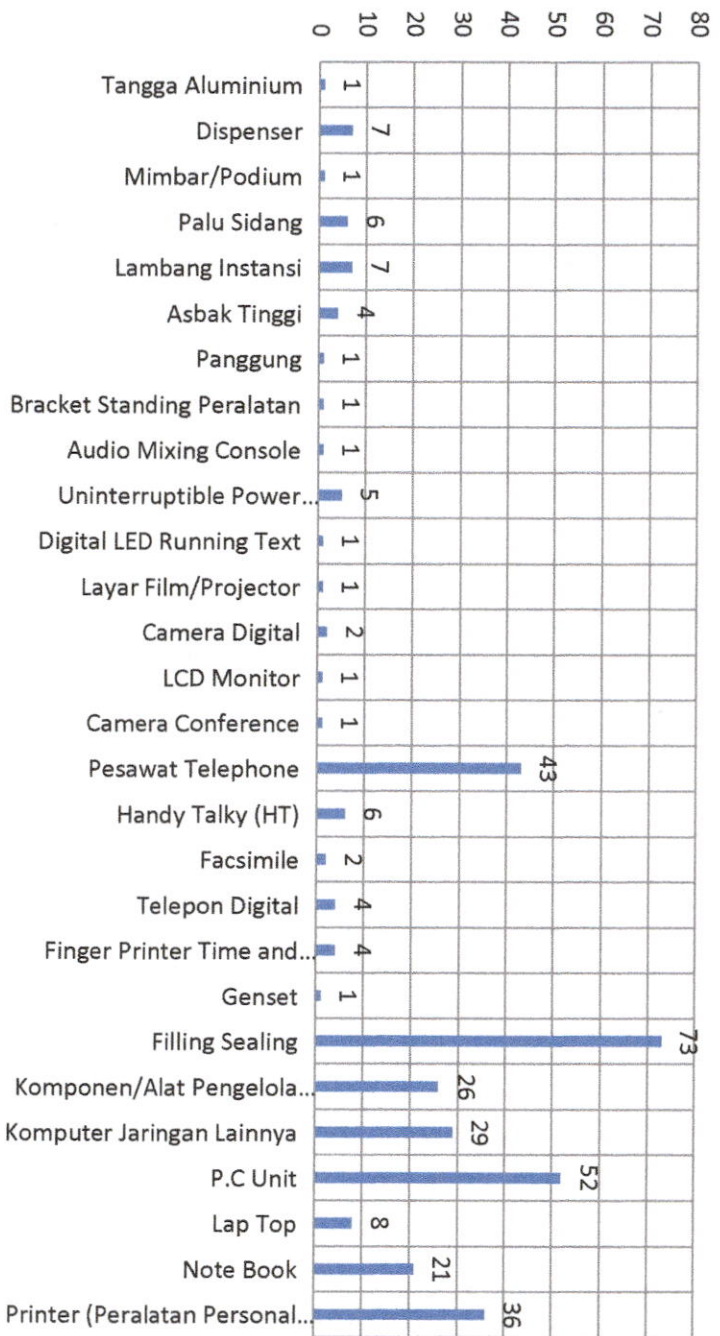


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

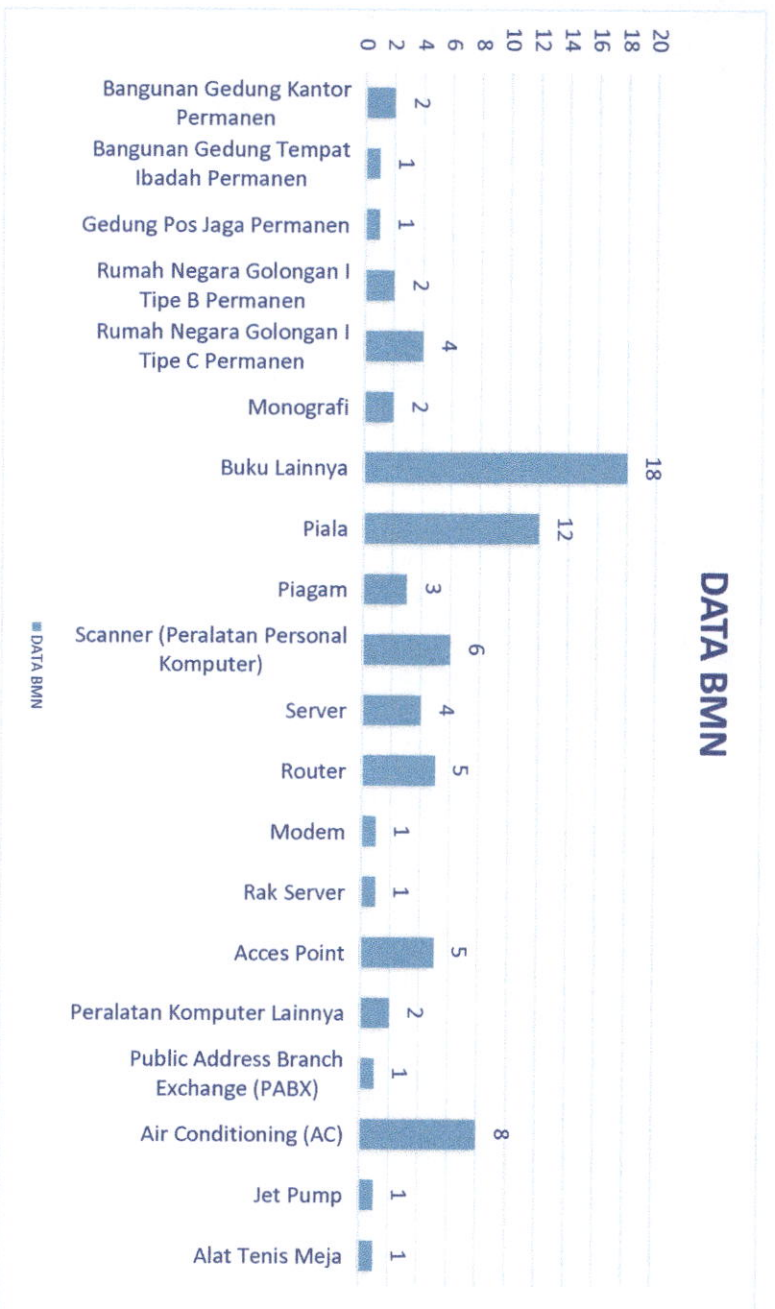
DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Maret 2025 Perpustakaan Pengodilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Maret 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	15.872.103.000	0	3.830.438.287	2.742.566.138	6.573.004.425	41,41 %	9.299.098.575
WA Program Dukungan Manajemen	15.872.103.000	0	3.830.438.287	2.742.566.138	6.573.004.425	41,41 %	9.299.098.575
WA 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
EBB 951 Layanan Sarana Internal	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
002 Pengadaan peralatan, fasilitas perkantoran	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
002.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
WA 0986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	15.732.413.000	0	3.740.838.287	2.742.566.138	6.483.404.425	41,21 %	9.249.008.575
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.732.413.000	0	3.740.838.287	2.742.566.138	6.483.404.425	41,21 %	9.249.008.575
EBA 902 Layanan Umum	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
001 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
001.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
EBA 994 Layanan Perkantoran	15.731.413.000	0	3.740.838.287	2.742.566.138	6.483.404.425	41,21 %	9.249.008.575
001 Gaji dan Tunjangan	13.033.656.000	0	3.259.708.329	2.226.402.389	5.486.110.718	42,09 %	7.547.545.282
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	13.033.656.000	0	3.259.708.329	2.226.402.389	5.486.110.718	42,09 %	7.547.545.282
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4.605.059.000	0	1.005.183.560	699.290.740	1.704.474.300	36,32 %	2.840.584.700
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.000	0	12.575	9.044	21.619	35,44 %	39.381
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	370.204.000	0	78.827.198	51.702.132	130.529.330	35,26 %	239.674.670
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	120.138.000	0	24.912.250	16.700.284	41.612.534	34,64 %	78.525.466
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	0	8.540.000	5.760.000	14.300.000	33,33 %	28.800.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	893.005.000	0	632.795.000	27.010.000	659.805.000	73,89 %	233.200.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	121.287.000	0	78.296.801	12.765.278	91.062.139	74,89 %	30.224.861
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	0	54.604.680	35.992.740	90.597.420	35,18 %	166.927.580
511129 Belanja Uang Makan PNS	1.001.611.000	0	58.937.000	61.297.000	120.234.000	12,00 %	881.377.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Maret 2025

menterian : 005 MAHKAMAH AGUNG
it Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
tuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	84.654.000	0	14.385.000	9.590.000	23.975.000	28,32 %	60.679.000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	600.422.000	0	144.875.341	245.822.583	390.697.924	65,07 %	209.724.076
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4.874.045.000	0	1.087.800.000	1.053.200.000	2.141.000.000	43,93 %	2.733.045.000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	0	8.576.400	5.717.600	14.294.000	36,10 %	25.306.000
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	0	204	148	352	5,03 %	6.648
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.704.000	0	0	0	0	0,00 %	3.704.000
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000	0	0	0	0	0,00 %	1.480.000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	0	1.050.000	700.000	1.750.000	35,71 %	3.150.000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.054.000	0	217.260	144.840	362.100	8,93 %	3.891.900
511628 Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	0	595.000	700.000	1.295.000	15,42 %	7.105.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.097.757.000	0	481.123.358	316.163.749	867.287.107	36,97 %	1.720.469.283
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	789.561.000	0	118.228.000	121.736.449	239.964.449	30,39 %	549.596.551
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	789.561.000	0	118.228.000	121.736.449	239.964.449	30,39 %	549.596.551
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	236.400.000	0	216.735.648	0	216.735.648	91,68 %	19.664.352
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	196.600.000	0	189.960.000	0	189.960.000	96,62 %	6.640.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.800.000	0	120.000	0	120.000	2,50 %	4.680.000
522112 Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	675.648	0	675.648	11,26 %	5.324.352
522113 Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00 %	3.000.000
522141 Belanja Sewa	26.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92 %	20.000
002.0C Pemeliharaan Kantor	536.952.000	0	140.376.310	101.477.300	241.853.610	45,04 %	295.098.390
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.852.000	0	76.313.610	49.900.000	126.213.610	66,48 %	63.638.340
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0,00 %	45.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.100.000	0	64.062.700	51.577.250	115.639.950	38,28 %	186.460.050
002.0D Operasional Lainnya	239.914.000	0	5.790.000	0	5.790.000	2,41 %	234.124.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	90.904.000	0	0	0	0	0,00 %	90.904.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.760.000	0	0	0	0	0,00 %	80.760.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68.250.000	0	5.790.000	0	5.790.000	8,48 %	62.460.000

ck Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Maret 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	23.325.000	0	0	0	0	0 0,00 %	23.325.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000	0	0	0	0	0 0,00 %	22.200.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000	0	0	0	0	0 0,00 %	1.125.000
002.0H Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN-BKO	1.125.000	0	0	0	0	0 0,00 %	1.125.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000	0	0	0	0	0 0,00 %	1.125.000
002.0I Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870.480.000	0	0	292.950.000	292.950.000	33,65 %	577.530.000
522141 Belanja Sewa	870.480.000	0	0	292.950.000	292.950.000	33,65 %	577.530.000
ERO Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	0	0	0	0 0,00 %	300.000
ERO 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0 0,00 %	300.000
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0 0,00 %	300.000
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0 0,00 %	300.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	0 0,00 %	300.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Maret 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	81.750.000	0	4.200.000	4.320.000	8.520.000	10.42 %	73.230.000
BF Program Penegakan dan Pelebaran Hukum	81.750.000	0	4.200.000	4.320.000	8.520.000	10.42 %	73.230.000
BF.1009 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81.750.000	0	4.200.000	4.320.000	8.520.000	10.42 %	73.230.000
AEA Koordinasi	30.000.000	0	1.800.000	1.920.000	3.720.000	12.40 %	26.280.000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	30.000.000	0	1.800.000	1.920.000	3.720.000	12.40 %	26.280.000
001 Pelaksanaan Pengamanan Sidang	30.000.000	0	1.800.000	1.920.000	3.720.000	12.40 %	26.280.000
051.0A Pelaksanaan	30.000.000	0	1.800.000	1.920.000	3.720.000	12.40 %	26.280.000
521211 Belanja Bahan	30.000.000	0	1.800.000	1.920.000	3.720.000	12.40 %	26.280.000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	1.000.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000.000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.000.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000.000
001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1.000.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000.000
051.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	400.000	0	0	0	0	0.00 %	400.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	0	0	0	0.00 %	180.000
521211 Belanja Bahan	220.000	0	0	0	0	0.00 %	220.000
051.0B Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	550.000	0	0	0	0	0.00 %	550.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	0	0	0	0.00 %	180.000
521211 Belanja Bahan	220.000	0	0	0	0	0.00 %	220.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250.000	0	0	0	0	0.00 %	250.000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.000.000	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000	14.55 %	28.200.000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000	14.55 %	28.200.000
001 Pos Bantuan Hukum	33.000.000	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000	14.55 %	28.200.000
051.0A tanpa sub komponen	33.000.000	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000	14.55 %	28.200.000
521211 Belanja Bahan	4.200.000	0	0	0	0	0.00 %	4.200.000
522131 Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000	16.67 %	24.000.000
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17.690.000	0	0	0	0	0.00 %	17.690.000
QCA.002 Perkara yang diayahi melalui sidang di luar gedung ditunggunya	17.690.000	0	0	0	0	0.00 %	17.690.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Maret 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QCA.002 peradilan Tata Usaha Negara	17.690.000	0	0	0	0	0.00 %	17.690.000
001 Ruang di luar Gedung Pengadilan	17.690.000	0	0	0	0	0.00 %	17.690.000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	17.690.000	0	0	0	0	0.00 %	17.690.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	300.000	0	0	0	0	0.00 %	300.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.390.000	0	0	0	0	0.00 %	17.390.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Februari 2025 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 PTUN Jakarta akan mengadakan kegiatan buka bersama dengan anak Yatim dan akan dihadiri oleh YM Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara, YM. Hakim Agung Tata Usaha Negara, Bapak Dirjen Badimiltun, Hakim Yustisi Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Serang, dll. Memperhatikan hal tersebut maka diharapkan kehadiran dan kerjasama seluruh bapak dan ibu untuk mensukseskan kegiatan tersebut.
- Berhubungan dengan kedisiplinan pegawai dalam hal ini ketentuan pakaian seragam, Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan agar seluruh Hakim, Pegawai, dan PPNPN mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan sepatu selama berada di lingkungan kantor kecuali saat mau melakukan ibadah sholat.
- Masih sehubungan dengan kedisiplinan pegawai, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Bapak Wakil Ketua selaku Ketua Tim Penegakan disiplin Pegawai agar membina pegawai yang melanggar disiplin seperti tidak melakukan presensi hadir dan pulang, tidak mengikuti apel pagi dan sore, serta tidak mengikuti rapat bulanan.
- Terkait dengan akan diterapkannya e-register, bahwa data yang digunakan pada aplikasi e-register adalah data dari SIPP oleh karena itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengintruksikan kepada seluruh calon hakim untuk menyisir kelengkapan data SIPP PTUN Jakarta dan harus selesai dalam waktu 1 minggu serta disampaikan pula kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala agar membuat SK Ketua tentang pembentukan tim e-register.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa tanda bintang pada beberapa mata anggaran yang terdapat dalam DIPA PTUN Jakarta sudah dihilangkan yang berarti beberapa mata tersebut dapat digunakan kembali sehingga kantor kita dapat membuat sarana dan prasarana terutama yang digunakan untuk mendukung program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Berhubungan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Ibu Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa PTUN Jakarta telah paripurna dalam penerapan SMAP sehingga tidak lagi dilakukan tahapan penilaian seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun demikian PTUN Jakarta tetap harus menerapkan SMAP dengan ketat dan disiplin agar predikat SMAP tidak dicabut.
- Bapak Yarwan, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar PTUN Jakarta karena telah turut serta meramaikan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang ada di PTUN Jakarta selama bulan suci Ramadhan kali ini yaitu seperti buka puasa bersama, membagi takjil pada hari jumat, tadarusan, dll.
- Terkait dengan kedisiplinan terutama dalam hal presensi, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan agar kedisiplinan selalu ditingkatkan dan Perma 8 harus diterapkan sebetul-betulnya dan apabila ada pegawai yang melanggar ketentuan disiplin maka atasan langsung harus melakukan pembinaan secara berjenjang.
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait progress penguploadan dokumen Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada aplikasi PMPZI telah selesai dilakukan dan semoga apa yang telah kita kerjakan mendapatkan nilai terbaik sehingga kita dapat diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI untuk dapat mengikuti penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahap selanjutnya.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Seperti yang telah disinggung oleh Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya terkait SMAP, Bapak Wakil Ketua menyampaikan bahwa walaupun PTUN Jakarta telah paripurna dan tidak mengikuti tahapan penilaian seperti tahun-tahun sebelumnya akan tetapi tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerapan SMAP dan kita tetap dapat melakukan sharing dan konsultasi kepada narahubung yang tertera.
- Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Wakil Ketua agar seluruh calon hakim dilibatkan dan harus dibuatkan SK tersendiri sebagai tim pendamping di luar SK utama tim kelompok kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan apabila terdapat info hakim maupun pegawai yang sedang sakit atau terkena musibah agar segera diinfokan sehingga pimpinan mengetahui dan ada perhatian dari kantor. Selain itu Wakil Ketua juga menyampaikan agar segala bentuk pengelolaan uang lebih transparan dan segala info yang terkait dengan pencairan dana apapun di kantor dapat di share di group new rumah PTUN agar semua pihak dapat mengetahuinya.
- Bapak Arifuddin, S.H., M.H. selaku ketua panitia buka puasa bersama dengan anak Yatim menyampaikan bahwa progres untuk kegiatan buka puasa bersama telah terlaksana sebesar 80% dan siap untuk melaksanakan buka puasa bersama pada hari yang telah dijadwalkan.

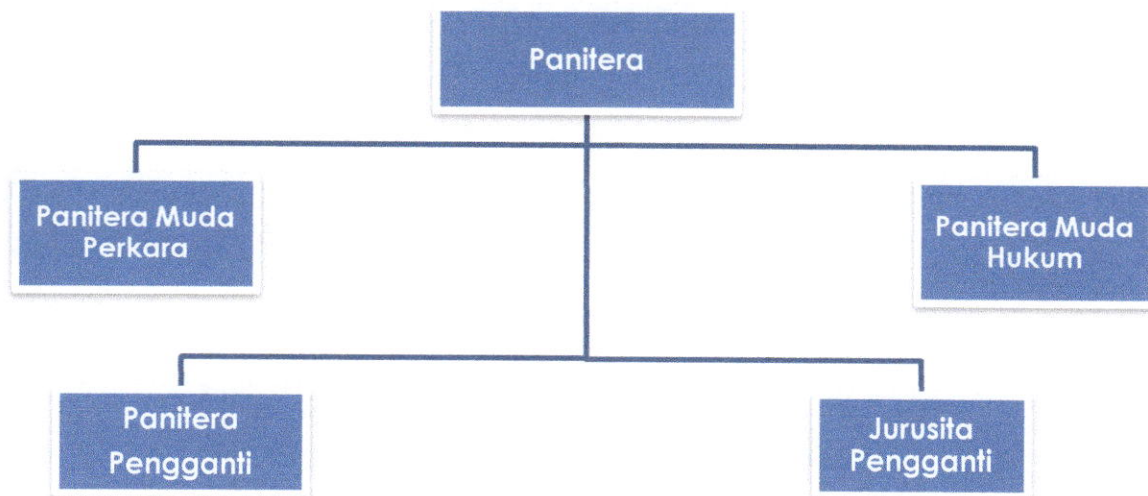
b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

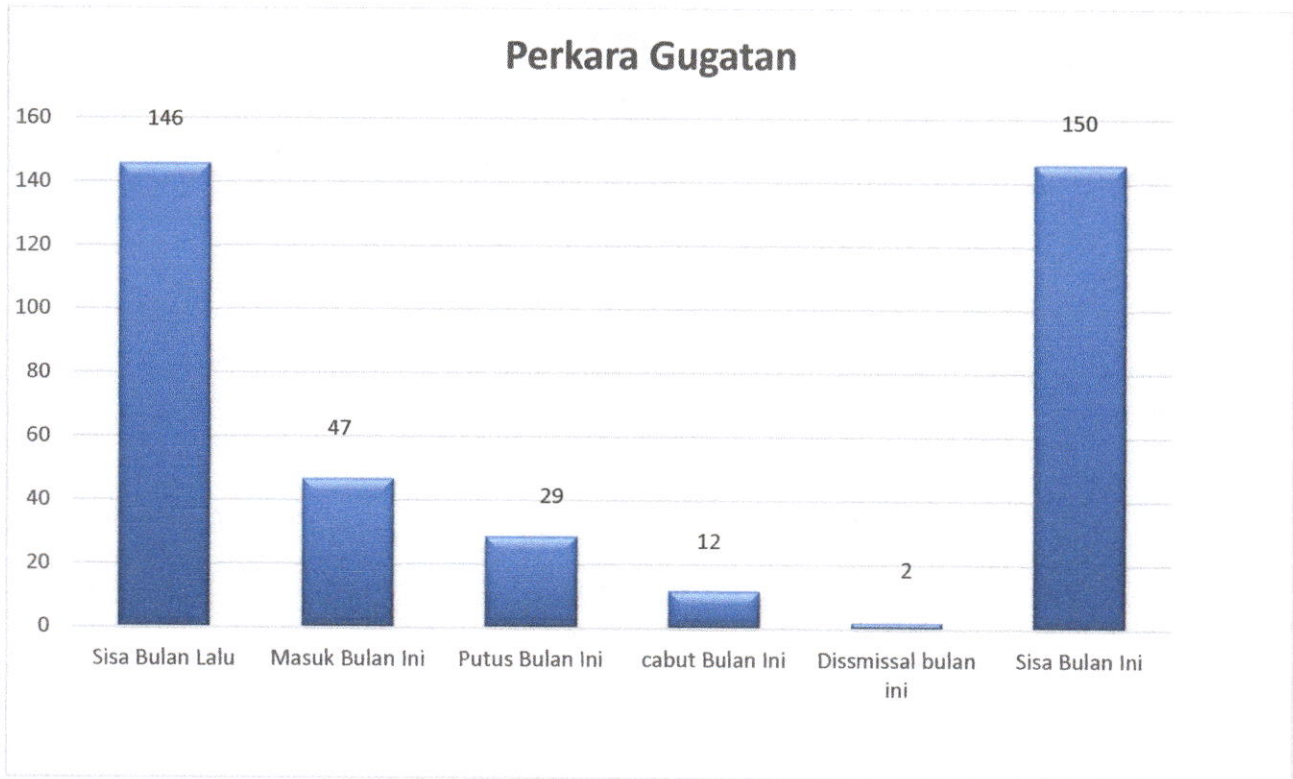
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

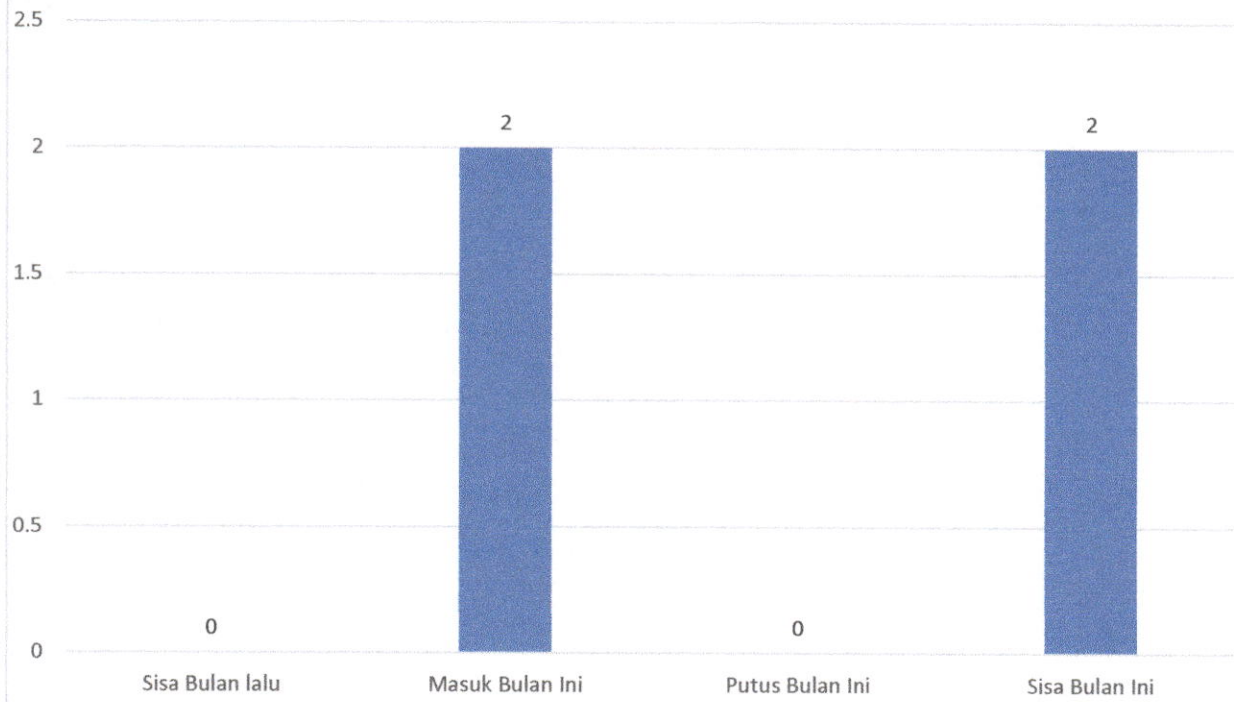
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $12 + 2 + 29 = 43$ Perkara

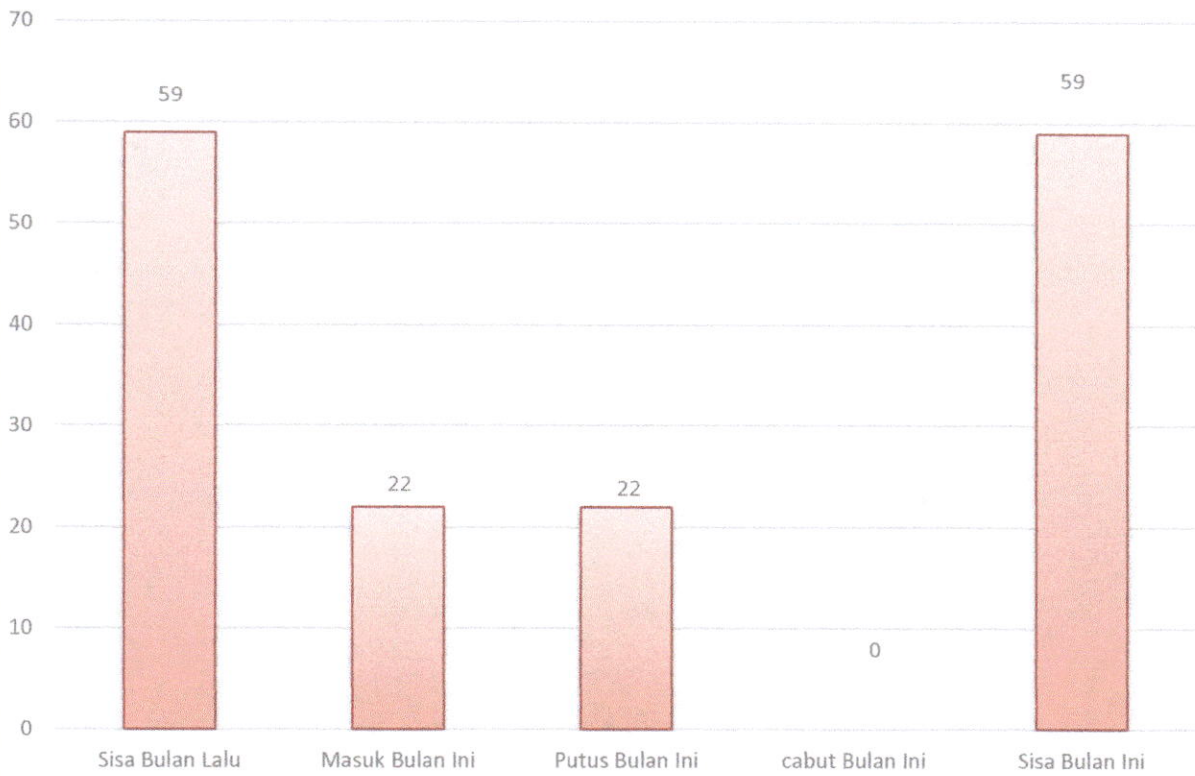
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

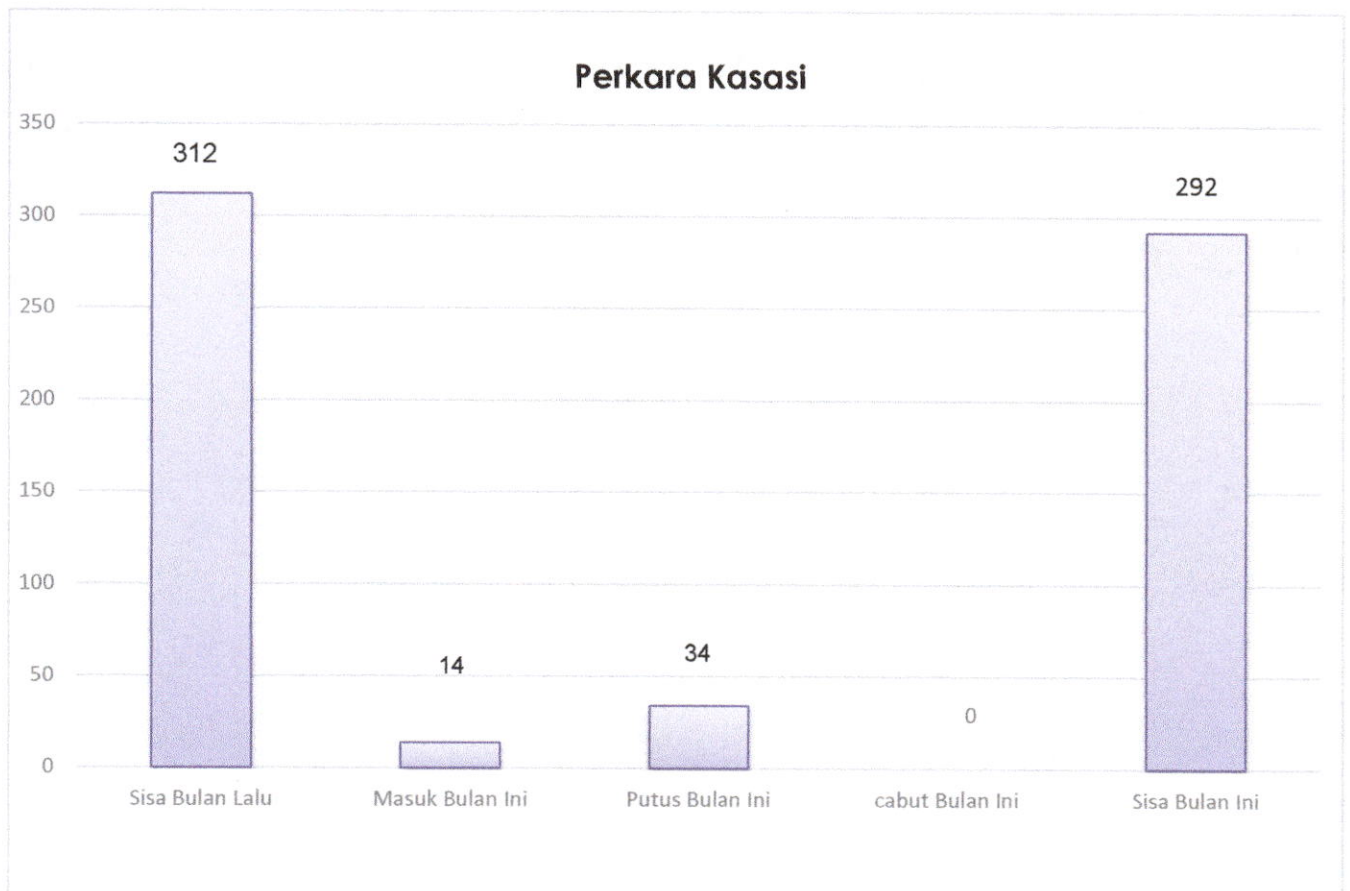


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Februari 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN MARET TAHUN 2025

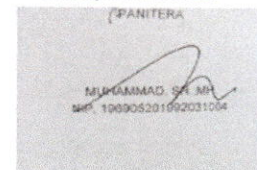
FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Ssa Bulan Lalu	Perkara		Penggugat Jumlah Perorangan	Tergugat Badan Hukum	Peringatan Pusat	Daerah	Perlawanan Daerah	Putusan	Permohonan	Terima Berkas		Keterangan													
			Masuk	Dicabut								Bandung	Kembali														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A GUGATAN																											
1	Pertanahan	16	6	2	20	6	-	-	6	-	-	-	-	-	3	1	4	16	2	2	1	-	3	1	3		Perkara Masuk 2 PLW
2	Kepegawaian	5	10	-	15	9	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	1	14	-	2	-	-	3	1	-		
3	Perjanjian	29	7	2	34	1	6	7	-	-	-	-	-	2	-	6	2	10	24	6	4	-	-	5	6	1	
4	Lingkungan Hidup	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tenden/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol	27	7	-	34	5	2	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	31	1	1	-	3	-	1		
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kelenagakeanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	15	1	-	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	5	11	4	4	13	1	7	21	3		
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Lain Lain	49	16	2	63	15	1	11	4	1	-	-	-	2	3	8	-	14	49	9	1	1	-	1	5	2	
	JUMLAH	146	47	6	187	37	9	28	18	2	-	-	6	3	22	4	37	150	22	14	15	1	22	34	10		

MENGETAHUI



Jakarta, 27 MARET 2025



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Februari 2025

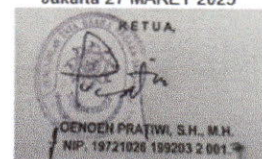
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN MARET TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 27 MARET 2025



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan, berupa buka puasa bersama dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Pada kesempatan tahun ini, buka puasa bersama dengan 50 santri dari Panti Asuhan An Ni'ma dan Yayasan Piatu Indonesia. Kegiatan buka puasa bersama Ramadhan 1446 H/ 2025 diselenggarakan di lingkungan Masjid Al Hakim PTUN Jakarta Pada tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan buka puasa dihadiri Ketua Muda Urusan Tata Usaha Negara, YM Prof. Dr. Yulius S.H., M.H. beserta istri, Hakim Agung YM. Dr. Yodi Martono Wahyunadi, dan YM. Dr. Cerah Bangun, Dirjen Badilmiltun, Direktur Binganismi Diltun, Ketua dan Wakil Ketua PT TUN Jakarta, Panitera Muda TUN MARI, Kepala Pengadilan Militer Jakarta, Sekertaris Dirjen Badilmiltun, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PTUN Bandung dan Ketua, Wakil dan hakim PTUN Serang.

BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 88 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 5 (lima) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Maret 2025 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Jakarta, 21 April 2025






Mengetahui
Ketua,
Gendeh Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

Sekretaris,









Giri Wahyu Utomo, S.Kom
NIP. 198403262009041004

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
		<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
		<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 			<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					